

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurigaan terhadap para pelaku bisnis yang terlibat, sehingga sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban, perusahaan wajib menyampaikan informasi keuangan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Penyampaian informasi laporan keuangan menjadi bentuk tanggung jawab manajer kepada pemilik perusahaan. Manajer memiliki kewajiban untuk menciptakan performa perusahaan yang baik sebab manajer yang mengelola operasional perusahaan. Laporan keuangan tersebut menjadi sumber data keuangan kepada pihak internal perusahaan seperti pemilik, manajemen, karyawan, dan juga pihak dari luar perusahaan seperti kreditur, pemerintah, investor, *supplier*, konsumen dan masyarakat lainnya. Laporan keuangan menjadi informasi keuangan perusahaan yang bermanfaat dalam mencerminkan performa perusahaan dan informasi tersebut akan digunakan oleh para pengguna baik internal maupun eksternal sebagai suatu acuan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan ekonomi bagi perusahaan.

Berdasarkan PSAK No. 1, tujuan dari disajikannya laporan keuangan pada suatu entitas yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi yang berpengaruh bagi operasional perusahaan (IAI, 2022). Sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu manajemen atas penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam mencapai hasil yang diharapkan berupa keuntungan. Maka data yang dikemukakan pada laporan keuangan harus wajar, jujur, serta harus terhindar dari manipulasi, agar dapat memenuhi tujuan utamanya yaitu sebagai bahan acuan para penggunanya dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi perusahaan. Maka dari itu, integritas yang tinggi sangat diperlukan dalam menyajikan laporan keuangan agar tidak memberikan petunjuk yang salah bagi para pengguna dalam mengambil keputusan. Integritas laporan keuangan menjadi suatu kriteria dalam menilai

sampai di mana laporan keuangan dapat menyajikan informasi secara tepat dan jujur. *Integrity of financial statement* yaitu keandalan data akuntansi yang disajikan secara transparan, akuntabilitas, dan netral (Jama'an, 2008)

Tabel 1. Hasil Survei Global ACFE

| Tipe <i>Fraud</i> | 2020 | | 2022 | |
|----------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | % Kasus | Kerugian | % Kasus | Kerugian |
| <i>Asset Misappropriation</i> | 86% | \$100.000 | 86% | \$100.000 |
| <i>Corruption</i> | 43% | \$200.000 | 50% | \$150.000 |
| <i>Financial Statement Fraud</i> | 10% | \$954.000 | 9% | \$593.000 |

Sumber: Diolah dari hasil survei global ACFE

Tabel di atas menunjukkan data jumlah persentase kasus kecurangan beserta jumlah rata-rata dampak kerugian atas kecurangan tersebut yang menggambarkan bahwa pada nyatanya masih terdapat kasus manipulasi laporan keuangan yang menggambarkan minimnya integritas dalam data keuangan perusahaan karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini dibuktikan melalui survei *fraud* global yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) setiap dua tahun sekali, berdasarkan tabel di atas yaitu hasil survei pada tahun 2020 dan 2022 dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan terjadinya kasus *asset misappropriation* dan *corruption*, diketahui bahwa kasus *financial statement fraud* merupakan yang paling sedikit terjadi dengan persentase jumlah kasus paling sedikit yaitu pada tahun 2020 hanya 10% dan tahun 2022 turun hanya 9%, tetapi kasus *financial statement fraud* menjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian paling besar dibandingkan yang lainnya hingga mencapai rata-rata \$954.000 pada tahun 2020 dan \$593.000 pada tahun 2022.

Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa presentase jumlah *fraud* secara global untuk kasus *asset misappropriation* konsisten di angka 86%, untuk kasus *corruption* mengalami peningkatan sebesar 7% dan kasus *financial statement*

fraud mengalami penerunan sebesar 1%. Menurut Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dilakukan oleh ICW, jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia mengalami fluktuatif jumlah kasus dari tahun 2019-2022 yaitu pada tahun 2019 jumlah kasus korupsi di Indonesia sebanyak 271 kasus, tahun 2020 terdapat 444 kasus, tahun 2021 terdapat 533 kasus, dan pada semester 1 tahun 2022 terdapat 252 penindakan kasus korupsi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perlu peningkatan dari segi pengawasan untuk menghindari penyelewengan terhadap anggaran dan terjadinya *fraud*.

Gambar 1. Persentase Kecurangan Menurut Survei ACFE 2020 Berdasarkan Industri

FIG. 20 What are the most common occupational fraud schemes in various industries?

| INDUSTRY | Cases | Billing | Cash larceny | Cash on hand | Check and payment tampering | Corruption | Expense reimbursements | Financial statement fraud | Noncash | Payroll | Register disbursements | Skimming |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------|---------|------------------------|----------|
| Banking and financial services | 364 | 8% | 10% | 18% | 9% | 40% | 8% | 10% | 10% | 2% | 2% | 10% |
| Government and public administration | 189 | 18% | 5% | 9% | 4% | 48% | 17% | 4% | 17% | 17% | 0% | 7% |
| Manufacturing | 177 | 23% | 5% | 6% | 8% | 50% | 20% | 18% | 23% | 10% | 2% | 8% |
| Health care | 145 | 33% | 10% | 10% | 14% | 40% | 22% | 14% | 24% | 15% | 6% | 10% |
| Energy | 89 | 24% | 6% | 7% | 6% | 66% | 11% | 9% | 25% | 6% | 1% | 9% |
| Retail | 89 | 22% | 15% | 15% | 11% | 37% | 17% | 6% | 20% | 11% | 7% | 15% |
| Insurance | 82 | 24% | 2% | 5% | 9% | 43% | 16% | 11% | 9% | 5% | 2% | 6% |
| Education | 82 | 30% | 9% | 13% | 18% | 30% | 22% | 7% | 17% | 13% | 1% | 22% |
| Construction | 77 | 22% | 13% | 12% | 17% | 47% | 9% | 25% | 13% | 13% | 4% | 13% |
| Transportation and warehousing | 64 | 13% | 5% | 9% | 5% | 52% | 9% | 3% | 23% | 6% | 0% | 19% |
| Technology | 63 | 24% | 0% | 5% | 6% | 46% | 13% | 13% | 22% | 11% | 0% | 0% |
| Telecommunications | 62 | 5% | 2% | 3% | 2% | 56% | 5% | 6% | 31% | 2% | 0% | 5% |
| Food service and hospitality | 59 | 22% | 20% | 10% | 12% | 39% | 8% | 8% | 25% | 12% | 10% | 14% |
| Services (professional) | 54 | 37% | 0% | 9% | 20% | 26% | 24% | 15% | 11% | 22% | 2% | 11% |
| Real estate | 52 | 25% | 13% | 12% | 21% | 48% | 17% | 15% | 12% | 8% | 4% | 27% |

Gambar 2. Persentase Kecurangan Menurut Survei ACFE 2022 Berdasarkan Industri

FIG. 21 WHAT ARE THE MOST COMMON OCCUPATIONAL FRAUD SCHEMES IN VARIOUS INDUSTRIES?

| INDUSTRY | Cases | Billing | Cash larceny | Cash on hand | Check and payment tampering | Corruption | Expense reimbursements | Financial statement fraud | Noncash | Payroll | Register disbursements | Skimming |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------|---------|------------------------|----------|
| Banking and financial services | 351 | 10% | 11% | 14% | 14% | 46% | 8% | 11% | 11% | 4% | 2% | 10% |
| Government and public administration | 198 | 21% | 8% | 7% | 9% | 57% | 12% | 8% | 16% | 16% | 3% | 8% |
| Manufacturing | 194 | 26% | 5% | 9% | 7% | 59% | 10% | 12% | 23% | 10% | 4% | 8% |
| Health care | 130 | 20% | 6% | 8% | 8% | 50% | 11% | 9% | 18% | 12% | 2% | 9% |
| Energy | 97 | 24% | 9% | 6% | 8% | 64% | 16% | 8% | 13% | 6% | 3% | 2% |
| Retail | 91 | 19% | 10% | 9% | 9% | 43% | 7% | 4% | 24% | 5% | 7% | 14% |
| Insurance | 88 | 15% | 9% | 8% | 10% | 40% | 9% | 5% | 8% | 10% | 2% | 11% |
| Technology | 84 | 21% | 6% | 10% | 6% | 54% | 14% | 8% | 30% | 5% | 1% | 1% |
| Transportation and warehousing | 82 | 20% | 9% | 15% | 4% | 59% | 11% | 7% | 22% | 9% | 4% | 11% |
| Construction | 78 | 24% | 8% | 10% | 14% | 56% | 17% | 18% | 24% | 24% | 3% | 9% |
| Education | 69 | 26% | 9% | 12% | 12% | 49% | 12% | 12% | 19% | 14% | 4% | 12% |
| Information | 60 | 15% | 5% | 5% | 8% | 58% | 12% | 12% | 33% | 7% | 2% | 7% |
| Food service and hospitality | 52 | 19% | 10% | 21% | 17% | 54% | 13% | 13% | 29% | 19% | 10% | 17% |

Dan jika dilihat dari jenis industri yang disurvei, menurut survei ACFE pada tahun 2020 dan 2022, yang paling banyak melakukan kasus *financial statement fraud* adalah *construction* yang mencapai 25 persen pada survei tahun 2020 dan 18 persen pada survei tahun 2022. Penyebab terjadinya kasus kecurangan di industri tersebut yaitu karena lemahnya pengendalian internal yang dilakukan perusahaan sehingga hal tersebut dapat memberi peluang bagi para pelaku untuk melakukan tindak kecurangan khususnya kecurangan laporan keuangan. Perusahaan konstruksi merupakan bagian dari perusahaan sektor infrastruktur (Idx.Co.Id).

Kasus proyek palsu yang melibatkan PT Waskita Karya menjadi salah satu contoh kasus kecurangan pada perusahaan sektor infrastruktur. KPK mencurigai Yuli Ariandi, selaku mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT

Amanda Uke Febrianti, 2023

PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, AUDITOR SWITCHING, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Waskita Karya telah melakukan manipulasi laporan keuangan khususnya data keuangan terkait proyek palsu tersebut. KPK juga menyelidiki adanya penerimaan aliran dana dari proyek fiktif tersebut. Pelaku telah menetapkan perusahaan kontraktor untuk melaksanakan proyek palsu yang terindikasi terdapat 14 proyek palsu yang mana proyek tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan lain tetapi diakui oleh perusahaan kontraktor yang ditetapkan pelaku. Alur aliran dana tersebut berasal dari PT Waskita yang membayarnya kepada kontraktor proyek palsu tersebut kemudian dikembalikan kepada pihak yang terlibat seperti Yuly Ariandi Siregar dan tersangka lainnya untuk keperluan pribadi. Akibat dari tindak kecurangan tersebut para tersangka mendapatkan vonis 4 sampai 7 tahun dengan kerugian hingga Rp 202,29 miliar (Kompas.com 2021).

Untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor dalam meningkatkan integritas laporan keuangan, salah satunya yaitu *intellectual capital*. Dalam perkembangan zaman, kinerja suatu perusahaan tidak hanya dinilai dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki atau asset berwujudnya saja, tetapi hal lain seperti pengetahuan sumber daya, sistem informasi, serta inovasi yang dimiliki perusahaan merupakan hal penting yang perlu ditingkatkan karena ini termasuk cara menaikkan performa perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Aset tidak berwujud tersebut biasa disebut sebagai *intellectual capital*. *Intellectual capital* perlu ditingkatkan karena tujuan dari dikembangkannya *intellectual capital* dalam perusahaan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dalam suatu perusahaan maka operasional perusahaan akan efisien dan efektif untuk menghasilkan performa yang baik. Dengan begitu, hal ini akan sejalan dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan sehingga siap menghadapi persaingan pasar (Febrilyantri, 2020).

Profitabilitas perusahaan dapat dilihat di dalam *financial statement*. Untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan dapat dipercaya dan bukan hasil manipulasi manajer, diperlukan pihak dari luar perusahaan yang independen. Sehingga perusahaan membutuhkan jasa auditor eksternal untuk meyakinkan pemakai informasi laporan keuangan bahwa informasi tersebut sesuai fakta. Peran auditor dalam hal ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan

karena pengguna laporan keuangan mempercayai auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kemungkinan terjadinya penyimpangan (Purba et al., 2018). Keandalan informasi keuangan entitas tergantung pada keterampilan auditor, yaitu kualifikasi profesional seorang individu dengan kemampuan teknis untuk mendeteksi penyimpangan dalam sistem akuntansi klien. Auditor harus menjaga kualitasnya yang ditunjukkan oleh kemampuan auditor untuk memeriksa, menemukan, dan melaporkan kecurangan atau kesalahan material dalam *financial statement*. Untuk mempertahankan independensi auditor maka dilakukan *auditor switching* atau pergantian auditor. Seperti yang dijelaskan dalam POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP bahwa pembatasan penggunaan jasa penggunaan jasa akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut

Selain dari pihak auditor, *whistleblowing system* berperan dalam mencegah praktik manipulasi laporan keuangan. Dengan diterapkannya sistem ini pada perusahaan, diharapkan dapat menambah kepercayaan publik pada perusahaan. *Whistleblowing system* merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan mengenai adanya praktik ilegal yang telah atau akan terjadi, dan melibatkan bahkan merugikan banyak orang (Srividhya & Shelly, 2012). Sehingga *whistleblowing system* ini menjadi sistem penyampaian dalam mengungkapkan dugaan tindak kecurangan yang atau akan terjadi di dalam perusahaan. Sistem ini menjadi wadah untuk mengadu jika terjadi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan pihak internal perusahaan.

Penelitian Fauziah & Panggabean (2019) berjudul “*Factors Affecting the Integrity of Manufacturing Company Financial Statements in Indonesian Stock Exchange and Malaysian Stock Exchange*”, menjadi acuan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian tersebut yaitu mengganti variabel kepemilikan manajerial dengan variabel *whistleblowing system* yang menjadi pembaruan penelitian ini karena menurut penelitian yang dilakukan Srikandhi & Suryandari (2020) belum ada penggunaan *whistleblowing system* dalam penelitian integritas laporan keuangan. Selain itu sampel perusahaan yang diteliti juga berbeda, penelitian tersebut menggunakan sektor manufaktur sedangkan penelitian ini menggunakan sektor infrastruktur.

Perbedaan hasil dari peneliti sebelumnya terdapat pada hasil penelitian Febrilyantri (2020) dan Palebangan & Majidah (2021) yang menyatakan adanya pengaruh dari *intellectual capital* terhadap terciptanya integritas laporan keuangan sedangkan pada penelitian Fauziah & Panggabean (2019) berpendapat bahwa pada perusahaan manufaktur di Malaysia, *intellectual capital* tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Selain itu penelitian mengenai *auditor switching* juga masih terdapat perbedaan hasil, seperti pada hasil penelitian Totong & Majidah (2020) dan Kartika & Nurhayati (2018) menyatakan adanya pengaruh dari *auditor switching* terhadap terciptanya integritas laporan keuangan, sedangkan pada penelitian Selviana & Wenny (2021) dan Fitriyana & Nazar (2022) berpendapat bahwa *auditor switching* tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa variabel masih terjadi perbedaan hasil dan pendapat dari beberapa peneliti. Hal tersebut membuktikan bahwa penelitian terkait integritas laporan keuangan belum mendapatkan hasil yang tetap. Maka dari itu, peneliti ingin berkontribusi dengan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Intellectual Capital*, *Auditor Switching*, dan *Whistleblowing System* terhadap Integritas Laporan Keuangan”. Diharapkan dengan adanya penelitian ini perusahaan bisa lebih meningkatkan sumber daya dan pengawasan internal sebagai upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas sehingga memberikan kepercayaan bagi para penggunanya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah *auditor switching* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah penerapan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh positif dari *intellectual capital* dalam terciptanya integritas laporan keuangan.
2. Untuk membuktikan pengaruh positif dari *auditor switching* dalam terciptanya integritas laporan keuangan.
3. Untuk membuktikan pengaruh positif dari penerapan *whistleblowing system* dalam terciptanya integritas laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang sudah dibuat, manfaat dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori bagi para akademisi khususnya terkait dengan *intellectual capital*, *auditor switching* dan penerapan *whistleblowing system* dalam menciptakan integritas laporan keuangan. Dan juga hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah literatur dan referensi bagi peneliti dalam bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai *intellectual capital*, *auditor switching* dan penerapan *whistleblowing system* dalam menciptakan integritas laporan keuangan suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan keputusan ekonomi yang akan ditetapkan.

2. Bagi Kreditor

Penelitian ini dapat memberikan suatu pandangan bagi para kreditor mengenai pengaruh *intellectual capital*, *auditor switching* dan penerapan *whistleblowing system* dalam menciptakan integritas laporan keuangan yang bisa menjadi bahan acuan dalam memberikan kredit kepada perusahaan.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator terhadap kebijakan mengenai pengaruh *intellectual capital*, *auditor switching* dan penerapan *whistleblowing system* terhadap integritas laporan keuangan di Indonesia.